



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

01
BALAI
KELAUTAN
PERIKANAN

KKP
2026
#GROWSTRONGER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR



Triwulan I Tahun 2026

LAUT
SEHAT
KONSERVASI
KUAT
INDONESIA
SEJANTERA

BALAI
PENGELOLAAN
KELAUTAN
DENPASAR

Salam
PRIMA



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Getreda Melsina Hehanussa

PENYUSUN

A. Bobby Yefry Adi Rianto

Faizal Tuhulele

Suci Kusumastuti Nur Azizah

Dewi Setiyaningsih

Sitti Ferawati Yusuf

Iwan Nurhidayat

KONTRIBUTOR

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan
Laut Denpasar



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	3
1.4 Organisasi.....	5
1.5 Kepegawaian.....	8
1.6 Potensi	10
1.7 Permasalahan	18
1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
IK 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Nilai)	32
IK 2. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Kesepakatan)	34
IK 3. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)	35
IK 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis).....	37
IK 5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis).....	39
IK 6. Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (spesies).....	41



IK 7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)	45
IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%).....	46
IK 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Denpasar(%) .	48
IK 10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Denpasar (Nilai) ..	50
IK 11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPK Denpasar (Nilai)	52
IK 12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai).....	55
IK 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)	56
IK 14. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPK Denpasar (Dokumen) ..	60
IK 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPK Denpasar (Indeks).....	62
IK 16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Denpasar (Nilai).....	67
IK 17. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Denpasar (%)	69
IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPK Denpasar (Nilai)	71
3.3 Realisasi Anggaran.....	74
BAB IV PENUTUP.....	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Rekomendasi.....	76

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja.....	7
Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia	12
Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	12
Tabel 4. Potensi Perikanan Wilayah Kerja Balai PK Denpasar	13
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPK Denpasar	16
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPK Denpasar Tahun 2026.....	24
Tabel 7. Target dan Realisasi BPK Denpasar Tahun 2026	28
Tabel 8. Capaian IK 1 BPK Denpasar	33
Tabel 9. <i>Capaian IK 2 BPK Denpasar</i>	34
<i>Tabel 10. Nilai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi.....</i>	36
Tabel 11. Capaian IK 3 BPK Denpasar.....	36
Tabel 12. Capaian IK 4 BPRL Denpasar	38
Tabel 14. Capaian IK 5 BPK Denpasar.....	40
Tabel 14. Capaian IK 5 BPK Denpasar.....	43
<i>Tabel 16. Jumlah dan Jenis Biota yang dimanfaatkan berkelanjutan di Wilayah kerja BPK Denpasar Triwulan I 2026</i>	44
Tabel 16. Capaian IK 5 BPK Denpasar.....	45
Tabel 18. Capaian IK 8 BPK Denpasar	47
Tabel 19. Capaian IK 9 BPK Denpasar	49
Tabel 19. Capaian IK 10 BPK Denpasar.....	52
Tabel 21. Capaian IK 11 BPK Denpasar	53
Tabel 22. Capaian IK 7 BPK Denpasar.....	55
Tabel 23. Capaian IK 13 BPK Denpasar	59
Tabel 24. Capaian IK 9 BPK Denpasar.....	61
Tabel 25. Capaian IK 15 BPK Denpasar.....	66
Tabel 25. Capaian IK 16 BPK Denpasar.....	69
Tabel 27. Capaian IK 17 BPK Denpasar.....	70
Tabel 28. Capaian IK 18 BPK Denpasar.....	73



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPK Denpasar TA 2026.....	8
Grafik 2. Perincian sebaran PPPK BPK Denpasar TA 2026.....	9
Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPK Denpasar TA 2026 ...	9
Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPK Denpasar TA 2026	10
Grafik 5. Distribusi SDM BPK Denpasar TA 2026	10



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Denpasar	6
Gambar 2. KKP3K di wilayah Sulawesi.....	17
<i>Gambar 2. NPSS BPK Denpasar.....</i>	<i>28</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Denpasar Triwulan I Tahun 2026 yang mendokumentasikan secara singkat mengenai gerak langkah dan kontribusi BPK Denpasar selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran dan informasi tentang capaian program dan kegiatan BPK Denpasar selama Triwulan I Tahun 2026 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BPK Denpasar dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian atas terselenggaranya program dan kegiatan BPK Denpasar.

Gianyar, 12 April 2026

Kepala BPK Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja disusun secara periodik, baik triwulanan (Laporan Kinerja Interim) maupun tahunan (Laporan Kinerja Tahunan), yang mencakup proses pengukuran, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) capaian kinerja secara memadai.

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat mengenai capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sekaligus sebagai instrumen evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024, telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) menjadi Balai Pengelolaan Kelautan. Dalam konteks tersebut, BPK Denpasar telah bertransformasi menjadi Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar dengan mandat yang lebih luas dalam pengelolaan kelautan secara terintegrasi.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 ini telah mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Arah kebijakan tersebut menitikberatkan pada penguatan ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, perlindungan ekosistem pesisir dan laut, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Maret



2026. Penyusunan laporan ini telah mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, serta selaras dengan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024.

Pada pelaporan LKj Triwulan I Tahun 2026, data capaian dan target Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) yang dapat diukur pada Triwulan Tahun 2026 adalah IK 6 Biota perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPK Denpasar (spesies) dengan target 28 spesies dan capaian 148 Spesies; IK 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%) dengan target 81 dan capaian 100 ; IK 14 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPK Denpasar (dokumen) dengan target 1 dokumen dan capaian 1 dokumen; IK17 Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Denpasar (%) dengan target 74 dan capaian 100

Pagu awal BPK Denpasar tahun 2026 adalah sebesar 15.364.110.000 yang terdiri dari RM 13.364.119.000 dan PLN 2.000.000.000. Dari pagu awal terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) sebesar 2.564.650.000. Blokir ini berupa blokir kode 2 (alokasi harus dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sebesar RP.387.910.000 yang terdiri dari belanja belanja modal (53) 200.000.000 dan pemeliharaan gedung 187.910.000. Blokir lain adalah blokir kode 3 (Belum Memenuhi Persyaratan Teknis/Substantif) sebesar RP. 2.176.740.000 yang seluruhnya terdiri dari belanja barang. Setelah dilakukan revisi anggaran, terdapat perubahan komposisi anggaran yang bisa digunakan dan yang blokir. Terdapat pemotongan anggaran sebesar 1.624.696.000 dan perubahan komposisi blokir dari blokir kode 3 menjadi



kode A. Terdapat pembukaan blokir sebesar 906.981.000. Selain itu juga dilakukan pembukaan seluruh anggaran yang diblokir dari kode 2 dan pembukaan anggaran dari kode blokir 3 sebesar 1.212.103.000. Total realisasi sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.853.195.385 atau 22,25%.

Pengukuran capaian kinerja BPK Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum pada perjanjian kerja. Hasil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM BPK Denpasar Triwulan I Tahun 2026 adalah 117,5% yang berkategori istimewa dengan ditandai warna biru pada aplikasi kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).

Langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja BPK Denpasar kedepan antara lain; Melaksanakan peningkatan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES dan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi; Meningkatkan pelaksanaan kemitraan kawasa konservasi; Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pelestarian jenis ikan terancam punah di wilayah kerja BPK Denpasar; Melaksanakan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi BPK Denpasar dengan tatakelola pemerintahan yang baik, dan melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.



BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Denpasar menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BPK Denpasar Tahun 2026.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Denpasar Triwulan I Tahun 2026.



1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Denpasar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengelolaan kelautan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai ini berperan dalam mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, dengan menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari pelaksanaan program atau kegiatan berupa sarana, barang, dan jasa layanan, sedangkan outcome adalah berfungsinya output tersebut sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar dibentuk sebagai bagian dari transformasi kelembagaan UPT pengelolaan ruang laut, yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, serta diperkuat dengan kebijakan penataan organisasi kementerian/lembaga sesuai Perpres Nomor 193 Tahun 2024.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mengawal implementasi berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya. Balai ini memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kelautan yang mencakup perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan kelautan;
2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya kelautan beserta ekosistemnya;



3. Pelaksanaan mitigasi bencana kelautan, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran di wilayah pesisir dan laut;
4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
5. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Fasilitasi penataan ruang laut dan pesisir;
8. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Selain itu, pembentukan Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar memiliki beberapa tujuan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kelautan di daerah, antara lain:

1. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik khusus yang menjadi kewenangan pemerintah pusat;
3. Pelaksanaan monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah, termasuk habitat, populasi, serta spesies migrasi yang memiliki nilai konservasi nasional dan/atau internasional;
4. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan konvensi dan perjanjian internasional seperti Convention on Biological Diversity, Ramsar Convention on Wetlands, World Heritage Site, dan CITES, serta kerja sama regional seperti Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security;
5. Pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam memfasilitasi pemerintah daerah dan memberikan bimbingan teknis kepada para pemangku kepentingan;
6. Pembinaan dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat; dan
7. Dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut.



1.4 Organisasi

Struktur organisasi Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mengacu pada kebijakan penataan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga yang lebih adaptif dan berbasis kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pengaturan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, yang telah diselaraskan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sejalan dengan implementasi penyederhanaan birokrasi, mekanisme kerja organisasi juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menekankan pada fleksibilitas kerja, kolaborasi lintas fungsi, dan penguatan peran jabatan fungsional.

Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia dan peta jabatan di lingkungan Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN/KP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN/KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024.

Dengan demikian, struktur organisasi Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar disusun secara lebih ramping, dinamis, dan berbasis fungsi, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Struktur organisasi tersebut tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Denpasar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai PK Denpasar dibantu 5 Satuan Pelayanan (Satpel) yang mana pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 yaitu Satker Surabaya, Satker Mataram dan Satker Kupang.



Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja

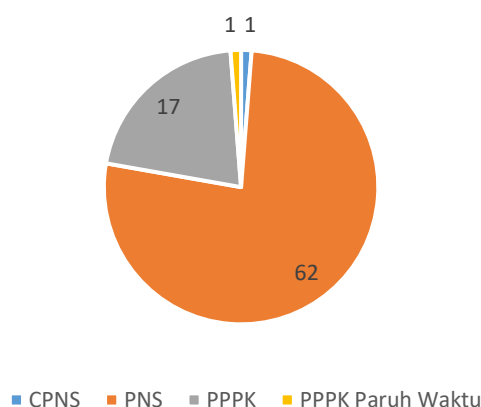
No	Nama Satpel	Koordinator	Wilayah Kerja
1.	Satpel Surabaya	Suwardi, S.T., M.Si	Provinsi Jatim
2.	Satpel Mataram	Nurhamdani, SE., MM.	Provinsi NTB
3.	Satker Manado	Moh. Yasir, S.Kel	Provinsi Sulawesi Barat
			Provinsi Sulawesi Selatan
			Provinsi Sulawesi Tenggara
			Provinsi Sulawesi Tengah
			Provinsi Sulawesi Utara
			Provinsi Gorontalo
			Kawasan Konservasi di Perairan Laut Sulawesi
4.	Satpel Lombok Utara	Martanina, S.St., Pi.	Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan
5	Satpel Pangkajene dan Kepulauan	Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya	Ilham, S.Kel.



1.5 Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) pada tahun 2026 sebanyak 81 orang terdiri dari 62 PNS, 1 CPNS, 17 PPPK, 1 PPPK Paruh Waktu. Komposisi pegawai berdasarkan status pegawai ditampilkan sebagai berikut:

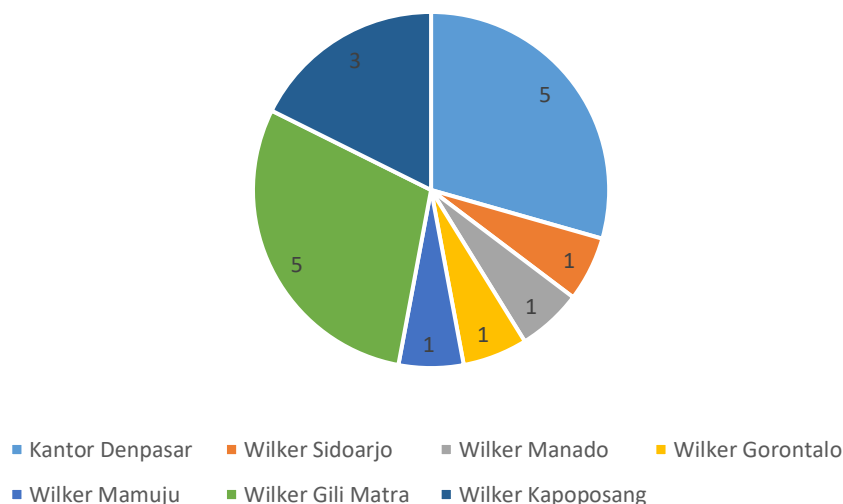
Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPK Denpasar TA 2026



Adapun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) 1 orang berada di kantor Denpasar sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah 17 orang tersebar di kantor Denpasar 5 orang, wilker Sidoarjo 1 orang, wilker Manado 1 orang, wilker Gorontalo 1 orang, wilker Mamuju 1 orang, wilker Gili Matra 5 orang dan wilker Kapoposang 3 orang. Sedangkan. Secara rinci ditampilkan dalam grafik sebagai berikut:

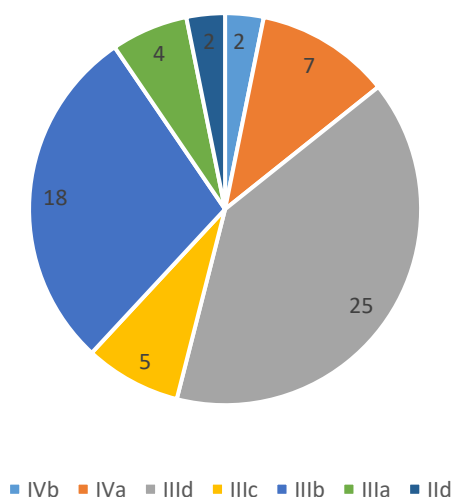


Grafik 2. Perincian sebaran PPPK BPK Denpasar TA 2026



Sedangkan komposisi PNS berdasarkan golongan dan ruang ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

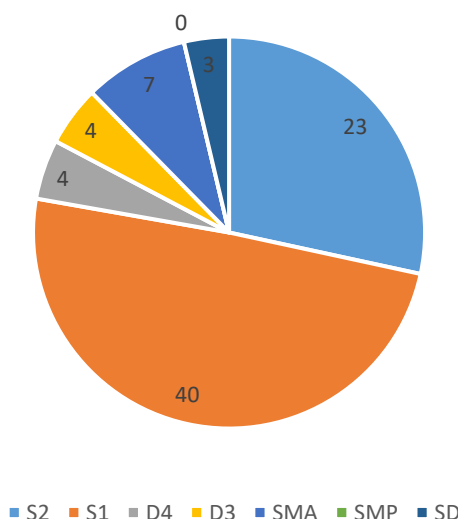
Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPK Denpasar TA 2026



Tingkat pendidikan pegawai BPK Denpasar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPK Denpasar. Untuk komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik 4 sebagai berikut.

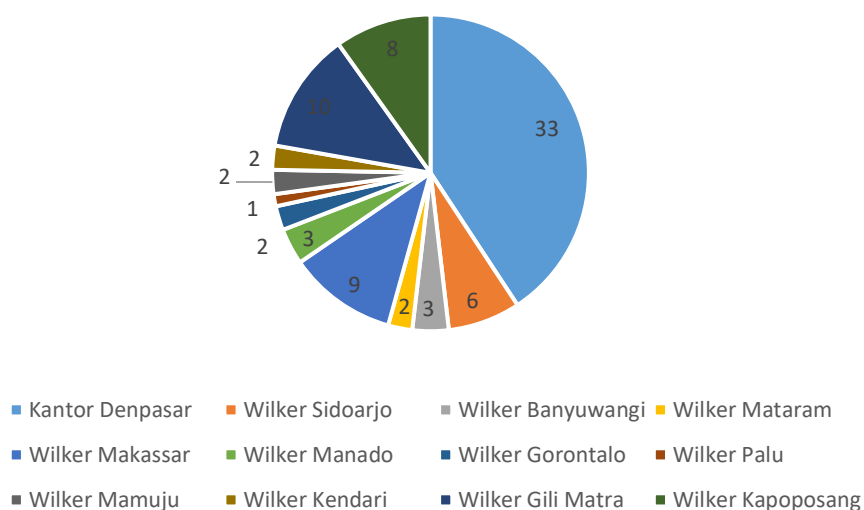


Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPK Denpasar TA 2026



Selain tingkat pendidikan, penempatan SDM merupakan faktor yang penting dalam mencapai sasaran strategis BPK Denpasar yang telah ditetapkan, mengingat BPK Denpasar memiliki kantor pusat dan lima satuan pelayanan yang meliputi beberapa wilker. Berikut distribusi PNS, PPPK, dan tenaga kontrak BPK Denpasar.

Grafik 5. Distribusi SDM BPK Denpasar TA 2026



1.6 Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis



yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “*services*” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang di Indonesia berdasarkan data dari LIPI 2.517.818 HA dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun di Indonesia mencapai 1.507



Km² Dengan keanekaragaman jenis. Selain itu terdapat potensi mangrove kritis dan non kritis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia

No	Regional	Luas (Ha
1	Sulawesi	862,627
2	Sumatera	478,587
3	Maluku	439,110
4	Nusa Tenggara	272,123
5	Papua	269,402
6	Kalimantan	119,304
7	Jawa	67,869
8	Bali	8,837
Total		2,517,858

Sumber: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar

No	Provinsi	Luas Mangrove (Ha)
1	Bali	2.33
2	Jawa Timur	30.839
3	Sulawesi Barat	3.491
4	Sulawesi Selatan	10.8
5	Sulawesi Tenggara	65.141
6	Sulawesi Tengah	38.064
7	Sulawesi Utara	12.014
8	Gorontalo	8.97
9	Nusa Tenggara Barat	11.032

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
Peta Mangrove Nasional (2023-2025)

Sumber daya ikan di perairan Indonesia mencakup sekitar 37% dari total spesies ikan dunia, dengan berbagai jenis yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, ikan hias, kekerangan, serta rumput laut.

Wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar yang meliputi Provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya.



Selain potensi perikanan ekonomis, kawasan ini juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk biota laut endemik, langka, dan dilindungi seperti kelompok cetacea (paus dan lumba-lumba), crustacea, bivalvia (kerang-kerangan), testudinata (penyu), serta berbagai jenis ikan dari kelas pisces.

Karakteristik wilayah yang mencakup perairan pesisir, laut dalam, serta ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove menjadikan wilayah kerja Balai PK Denpasar sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dan produksi perikanan nasional. Potensi ini sekaligus menuntut pengelolaan yang berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian sumber daya.

Tabel 4. Potensi Perikanan Wilayah Kerja Balai PK Denpasar

No	Provinsi	Potensi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	Potensi Budidaya Unggulan
1	Jawa Timur	± 1.300.000	Udang, bandeng, rumput laut
2	Bali	± 200.000	Ikan hias, kerapu, rumput laut
3	Nusa Tenggara Barat	± 330.000	Lobster, rumput laut, mutiara
4	Sulawesi Barat	± 150.000	Tuna, cakalang, rumput laut
5	Sulawesi Selatan	± 1.200.000	Udang, bandeng, rumput laut
6	Sulawesi Tenggara	± 500.000	Rumput laut, kerapu, kepiting
7	Sulawesi Tengah	± 400.000	Tuna, cakalang, rumput laut
8	Sulawesi Utara	± 600.000	Tuna, cakalang, ikan pelagis
9	Gorontalo	± 250.000	Tuna, cakalang, rumput laut

Sumber Data: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya (2022–2024)

Di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, terdapat keanekaragaman biota laut dilindungi dan/atau bernilai ekologis tinggi yang menjadi objek penting dalam kegiatan pendataan, pemantauan, dan pengelolaan berkelanjutan. Biota tersebut tersebar di berbagai provinsi dengan karakteristik ekosistem pesisir dan laut yang beragam, sebagai berikut:

Jawa Timur

Hiu paus ditemukan di perairan Probolinggo; kelompok hiu dan pari yang masuk Appendiks CITES tersebar di Muncar (Banyuwangi), Brondong (Lamongan), dan Prigi (Trenggalek); penyu terdapat di pesisir Banyuwangi dan Trenggalek; serta ekosistem terumbu karang berkembang baik di Banyuwangi dan Kepulauan Kangean.

**Bali:**

Penyu tersebar di wilayah Gianyar, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, dan Buleleng; hiu Appendiks ditemukan di Benoa dan Karangasem; lumba-lumba banyak dijumpai di perairan Lovina; terumbu karang terdapat di Buleleng, Denpasar, Badung, serta Nusa Penida; dan pari manta menjadi salah satu biota kunci di perairan Nusa Penida (Klungkung).

Nusa Tenggara Barat (NTB):

Penyu terdapat di Mataram dan Kabupaten Sumbawa; hiu dan pari Appendiks dijumpai di Tanjung Luar dan Sumbawa; terumbu karang berkembang di Lombok Utara dan Sumbawa; serta hiu paus muncul secara musiman di Teluk Saleh. Kawasan Gili memiliki potensi tinggi berupa terumbu karang sehat, penyu, serta ikan karang ekonomis penting.

Nusa Tenggara Timur (NTT):

Dugong dan lumba-lumba ditemukan di perairan Alor; penyu terdapat di Lembata dan Pulau Solor (Flores Timur); terumbu karang tersebar di Alor, Sikka, dan Ende; teripang bernilai ekonomis tinggi terdapat di Rote dan Riung; paus dijumpai di perairan Lembata; pari manta terdapat di Labuan Bajo; serta hiu dan pari Appendiks ditemukan di Namosain (Kupang) dan Papela (Rote).

Sulawesi Selatan:

Memiliki potensi terumbu karang yang luas, penyu, serta berbagai jenis ikan karang dan ikan pelagis bernilai ekonomis penting. Selain itu, terdapat potensi hiu dan pari pada beberapa lokasi pendaratan ikan, serta kawasan perairan Kapoposang yang dikenal sebagai habitat penting bagi biota karang dan ikan pelagis.

Sulawesi Tenggara:

Wilayah ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, terutama terumbu karang, penyu, dan mamalia laut seperti lumba-lumba. Selain itu, terdapat potensi Banggai Cardinal Fish, yaitu ikan hias endemik yang memiliki nilai konservasi tinggi dan menjadi perhatian dalam pengelolaan perdagangan dan keberlanjutannya.

**Sulawesi Tengah:**

Memiliki ekosistem pesisir yang lengkap meliputi terumbu karang, lamun, dan mangrove, yang menjadi habitat penting bagi berbagai biota seperti penyu dan dugong. Selain itu, wilayah ini juga merupakan habitat alami Banggai Cardinal Fish, yang menjadi komoditas ikan hias unggulan dengan status perlindungan terbatas dan membutuhkan pengelolaan berbasis konservasi.

Sulawesi Utara:

Wilayah ini memiliki potensi sumber daya ikan pelagis yang sangat besar, seperti tuna, cakalang, dan tongkol, yang merupakan komoditas utama perikanan tangkap. Selain itu, terdapat juga penyu dan keanekaragaman ikan karang yang tinggi, yang mendukung produktivitas ekosistem perairan.

Sulawesi Barat:

Memiliki potensi ekosistem pesisir berupa terumbu karang, lamun, dan mangrove, serta biota seperti penyu dan ikan karang. Selain itu, di beberapa wilayah muara dan perairan payau terdapat potensi keberadaan Buaya muara yang menjadi bagian penting dari ekosistem estuari dan memerlukan pengelolaan yang memperhatikan aspek konservasi dan keselamatan masyarakat.

Gorontalo:

Wilayah perairan Gorontalo memiliki potensi kemunculan Hiu paus yang cukup signifikan. Hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia yang bersifat filter feeder (pemakan plankton), dilindungi secara penuh, serta menjadi daya tarik ekowisata bahari. Keberadaan hiu paus di wilayah ini juga memerlukan pengelolaan interaksi wisata agar tetap menjaga kelestarian dan perilaku alaminya.

BPK Denpasar juga melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan KOMPAK berupa alat selam. Selain itu, BPK Denpasar juga menjalin kerjasama dengan instansi melalui kesepakatan perjanjian kerjasama di wilayah kerja.

Di wilayah kerja BPK Denpasar, terdapat banyak Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil baik yang telah ditetapkan maupun yang

sedang dalam proses penetapannya. Adapun status penetapan dan peraturan yang mengatur tercantum dalam tabel berikut:

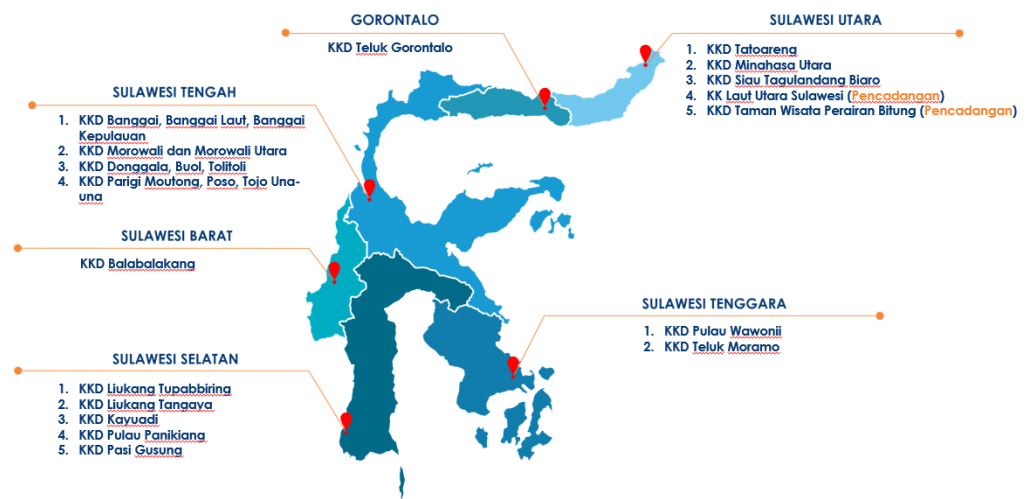
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPK Denpasar

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
1	KKPD Nusa Penida	Bali	Klungkung	20,057.00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018 mengganti KEPMENKP No. 24/KEPMEN-KP/2014
2	KKPD Buleleng	Bali	Buleleng	14,041.13	PENCADANGAN	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011
3	KKPD Jembrana	Bali	Jembrana	3,532.52	PENCADANGAN	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013 tanggal 30 Desember 2013
4	KKPD Karangasem	Bali	Karangasem	5,856.31	PENCADANGAN	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017 tanggal 19 Januari 2017
5	KKM Teluk Benoa	Bali	Badung dan Denpasar	1,243.41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019
6	KKPD di Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sidoarjo	72.32	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
7	KKPD di Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo	374.07	Sudah ditetapkan MKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2020 tanggal 10 Juni 2020
8	KKPD di Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Pasuruan	4073.74	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
9	KKPD di Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Situbondo	123.181	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
10	KKPD di Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Tulungagung	217	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
11	KKPD di Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Sumenep	72026.14	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
12	KKPD di Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	412.68	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
13	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	N T B	Kab. Lombok Timur	10000	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 92/KEPMEN-KP/2018
14	TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak	N T B	Kab. Lombok Barat	21132.82	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 93/KEPMEN-KP/2018
15	TWP Pulau Liang dan Ngali	N T B	Kab. Sumbawa	32644.43	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 20/KEPMEN-KP/2020
16	TWP Gili Banta	N T B	Kab. Bima	40276.54	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 21/KEPMEN-KP/2020
17	SAP Teluk Cempi	N T B	Kab. Dompu	22257.45	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 22/KEPMEN-KP/2020
18	TWP Teluk Bumbang	N T B	Kab. Lombok Tengah	6310	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
19	TPK Gili Balu	N T B	Kab. Sumbawa Barat	6005.2	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
20	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	N T B	Kab. Sumbawa	2000	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
21	TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk	N T B	Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat	72415.29	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
22	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	N T B	Kab. Sumbawa	26640.81	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
23	KKP3K Pulau Panjang	N T B	Kab. Sumbawa	22138.47	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
24	KKP Pulau Medang	N T B	Kab. Sumbawa	11339.56	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
25	KKP3K Pulau Kelapa	N T B	Kab. Bima	6947.28	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017



NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
26	KKP3K Pulau Sangiang	N T B	Kab. Bima	48610.01	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
27	KKPD Flores Timur	NTT	Flores Timur	150,000.00	Dicadangkan	Kep Gubernur No 308/KEP/HK/2017
28	KKPD Sikka	NTT	Sikka	207,062.92	Dicadangkan	Kep Gubernur No 107A/KEP/HK/2018
29	KKPD Lembata	NTT	Lembata	76,722.06	Dicadangkan	KepGub NTT nomor 192/Kep/HK/2019
30	KKPD SAP Selat Pantar	NTT	Alor	276,693.38	Ditetapkan	Kepmen KP Nomor 35/KEPMEN-KP/2015

Selain di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTB, Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) juga banyak terdapat di wilayah Sulawesi dengan persebaran seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. KKP3K di wilayah Sulawesi

PPKT adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove).

Wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mencakup sejumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:



a. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT):

Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu.

b. Provinsi Sulawesi Utara:

Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso, Pulau Makalehi, Pulau Kakorotan, Pulau Intata, Pulau Kabaruan, Pulau Bongkil, dan Pulau Mantehage.

c. Provinsi Sulawesi Tengah:

Pulau Lingian, Pulau Solando, dan Pulau Dolangan.

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

1.7 Permasalahan

BPK Denpasar menghadapi berbagai isu strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah kerja yang luas (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi), antara lain:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Masih terbatasnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi akibat keterbatasan SDM, anggaran, serta sarana prasarana, sehingga diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan terutama untuk kawasan konservasi yang tidak masuk dalam program LAUTRA.

2. Pengendalian Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES

Pengendalian pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau yang masuk dalam Appendiks CITES menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan adanya penambahan kewenangan pengelolaan jenis ikan/biota yang sebelumnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan dan dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sisi lain, dukungan anggaran dan sumber daya yang tersedia masih terbatas, sementara cakupan wilayah kerja yang harus



dilayani semakin luas.

3. Keterbatasan Data Keanekaragaman Hayati Laut

Belum tersedianya data yang terstandar dan berkelanjutan, sehingga diperlukan penguatan sistem pendataan dan integrasi data.

4. Degradasi Ekosistem Pesisir (Terumbu Karang dan Lamun)

Kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia, pencemaran, dan faktor lingkungan masih terjadi, sehingga perlu peningkatan upaya monitoring, rehabilitasi, dan edukasi.

5. Praktik Destructive Fishing

Masih ditemukannya praktik penangkapan ikan yang merusak, yang berdampak pada kelestarian sumber daya, sehingga perlu penguatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Optimalisasi Jasa Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat

Potensi jasa kelautan dan kelompok masyarakat pengelola belum teridentifikasi optimal, serta pendampingan masih terbatas.

7. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan PPKT

Keterbatasan aksesibilitas dan sarana prasarana menyebabkan pengelolaan pulau kecil belum optimal, sehingga perlu penguatan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis keberlanjutan.

8. Kelembagaan dan Luasnya Wilayah Kerja

Luasnya cakupan wilayah kerja berdampak pada tingginya beban kerja dan keterbatasan jangkauan layanan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan kolaborasi.

1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BPK Denpasar Tahun 2026 disusun dengan dasar hukum :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan menginformasikan **Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2026**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) pada Tahun 2026 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif,

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2026.

2. Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja tahun 2026 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di”*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dengan metode atau pendekatan BSC, telah dilakukan restrukturisasi SAKIP KKP dimulai dari level Renstra kementerian sampai dengan level monitoring dan pengukuran kinerja. Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), BPK Denpasar menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPK Denpasar berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Perjanjian Kinerja awal disahkan pada tanggal 17 Maret 2026.

Pagu awal BPK Denpasar tahun 2026 adalah sebesar 15.364.110.000 yang terdiri dari RM 13.364.119.000 dan PLN 2.000.000.000. Dari pagu awal terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) sebesar 2.564.650.000. Blokir ini berupa blokir kode 2 (alokasi harus dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sebesar RP.387.910.000 yang terdiri dari belanja belanja modal (53) 200.000.000 dan pemeliharaan gedung 187.910.000. Blokir lain adalah blokir kode 3 (Belum Memenuhi Persyaratan Teknis/Substantif) sebesar RP. 2.176.740.000 yang seluruhnya terdiri dari belanja barang. Setelah dilakukan revisi anggaran, terdapat perubahan komposisi anggaran yang bisa digukanan dan yang blokir. Terdapat pemotongan anggaran sebesar 1.624.696.000 dan perubahan komposisi blokir dari blokir kode 3 menjadi kode A. Terdapat pembukaan blokir sebesar 906.981.000. Selain itu juga dilakukan pembukaan seluruh anggaran yang diblokir dari kode 2 dan pembukaan anggaran dari kode blokir 3 sebesar 1.212.103.000. Total realisasi sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.853.195.385 atau 22,25%.



Adapun Perjanjian Kinerja BPK Denpasar sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPK Denpasar Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Nilai)	51
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPK Denpasar	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Kesepakatan)	1
3.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Denpasar	3.	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Nilai)	90
4.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPK Denpasar	4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)	18



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)	8
5.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar	6.	Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Spesies)	115
6.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPK Denpasar	7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)	80
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%)	81
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Denpasar (%)	100
		10	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Denpasar (Nilai)	75
		11	Nilai PM SAKIP BPK Denpasar (Nilai)	72
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)	89,5
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)	72,5



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		14	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPK Denpasar (Dokumen)	4
		15	Indeks Profesionalitas ASN BPK Denpasar (Indeks)	81
		16	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Denpasar (Nilai)	81
		17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Denpasar (%)	77
		18	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Denpasar (Nilai)	92



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



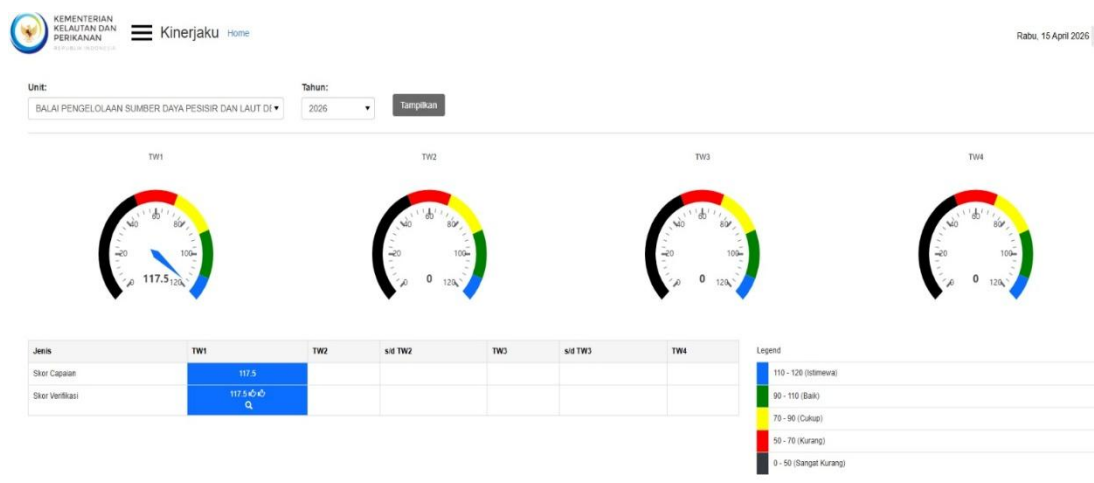


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPK Denpasar BPK Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BPK Denpasar terdiri dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2026 Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM diperoleh nilai 117,5 (sangat baik).



Gambar 3. NPSS BPK Denpasar

Tabel 7. Target dan Realisasi BPK Denpasar Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2026	TW I		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
1	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Nilai)	Tahun	51,00	0,00	0,00	-



No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2026	TW I		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
2	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Kesepakatan)	Tahun	1,00	0,00	0,00	-
3	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)	Tahun	90,00	0,00	0,00	-
4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)	Tahun	115,00	28,00	0,00	-
5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)	Tahun	8,00	0,00	0,00	-
6	Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (spesies)	Triwulan	28,00	0,00	148,00	120
7	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)	Tahun	80,00	0,00	0,00	-
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	Tahun	81,00	81,00	100,00	120



No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2026	TW I		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
	Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%)					
9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Denpasar (%)	Tahun	100,00	0,00	0,00	
10	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Denpasar (Nilai)	Tahun	75,00	0,00	0,00	-
11	Nilai PM SAKIP BPK Denpasar (Nilai)	Tahun	72,00	0,00	0,00	
12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)	Semeter	89,50	0,00	0,00	-
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)	Tahun	72,50	0,00	0,00	-
14	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPK Denpasar (Dokumen)	Triwulan	4,00	1,00	1,00	100
15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPK Denpasar (Indeks)	Semester	81,00	0,00	0,00	
16	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Denpasar (Nilai)	Tahun	81,00	0,00	0,00	-
17	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Denpasar (%)	Tahun	77,00	74,00	100,00	120



No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2026	TW I		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
18	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Denpasar (Nilai)	Tahun	92,00	0,00	0,00	-



IK 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Nilai)

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28/KEP-DJPRL/2020).

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*.



Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan nilai rata-rata yang menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari sudut pandang tata kelola, kondisi sumber daya kawasan konservasi, target konservasi, kondisi sosial ekonomi dan budaya dari seluruh kawasan konservasi.

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Nilai) didapatkan dengan cara melakukan penilaian terhadap 2 (dua) kawasan konservasi yaitu Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi



Nusa Tenggara Barat seluas 2.268,59 Hektar, dan Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi seluas 603.511,30 Hektar.

Tabel 8. Capaian IK 1 BPK Denpasar

SK 1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil					
IK 1	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Nilai)					
Tahun 2026	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2026 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	51	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 untuk indikator kinerja ini karena frekuensi penghitungan indikator kinerja ini adalah Tahunan. Pada IK ini hanya terdapat progress kegiatan antara lain rapat awal dan pembagian tugas internal.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Provinsi) antara lain:

1. Penjangkauan Stakholder di KKPN Gili Matra dan Kawasan di Sulawesi
2. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi dan Kawasan di Sulawesi



3. Survey kondisi Habitat dan Ekosistem Biota laut dilindungi, Sosial Ekonomi KKPN Gili Matra dan laut Sulawesi

IK 2. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kementerian atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan. Kemitraan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola dengan masyarakat. Masyarakat terdiri dari kelompok masyarakat, masyarakat adat, LSM, korporasi, lembaga penelitian, dan/atau perguruan tinggi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara Menjumlahkan dokumen draf final kesepakatan kemitraan yang diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi.

Tabel 9. *Capaian IK 2 BPK Denpasar*

SK 2	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPK Denpasar					
IK 2	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Kesepakatan)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 untuk indikator kinerja ini karena frekuensi penghitungan indikator kinerja ini adalah Tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan



Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi adalah penjangkauan Stake Holder di Gili Matra dan Kawasan di Sulawesi.

IK 3. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi berupa Karcis Masuk, Tanda Masuk Penelitian atau Tanda Masuk Pendidikan di Kawasan Konservasi Nasional.

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan ini meliputi Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi.

Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

Nilai Kriteria Permohonan yang Dilayani

$$\text{Nilai Pelayanan} = \frac{L}{P} \times 80$$

Nilai Kriteria Ketepatan Waktu

$$\text{Nilai Ketepatan Waktu} = \frac{T}{L} \times 20$$

Nilai Akhir Pelayanan

$$\text{Nilai Akhir} = \left(\frac{L}{P} \times 80\right) + \left(\frac{T}{L} \times 20\right)$$

Keterangan:

P = Jumlah total permohonan

L = Jumlah permohonan yang dilayani

T = Jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu



Tabel 10. Nilai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

KRITERIA	NILAI
Permohonan yang Dilayani Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani terhadap jumlah permohonan.	80
Ketepatan Waktu Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu dalam SOP terhadap jumlah permohonan yang dilayani	20

Tabel 11. Capaian IK 3 BPK Denpasar

SK 3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Denpasar					
IK 3	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	90	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026. Target dan capaian pada akhir tahun 2026. Pada IK ini hanya terdapat progres kegiatan antara lain rapat kerja internal tim pelayanan, penyusunan Surat Keputusan tim pelayanan BPK Denpasar, pemeriksaan rutin permohonan penerbitan perizinan jenis ikan dan penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan



Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis) adalah kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES sebagai berikut:

1. Rapat kerja internal tim pelayanan
2. Penyusunan SK Tim Pelayanan
3. Pemeriksaan terhadap permohonan penerbitan perijinan jenis ikan rutin dilaksanakan
4. Penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan rutin dilaksanakan

IK 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)

Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Penetapan status perlindungan biota perairan dilakukan berdasarkan kriteria:terancam punah; langka; daerah penyebaran terbatas; terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau; tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar dengan target jenis 18 (delapan belas) meliputi Belida Jawa, Sidat Marmorata, Hiu Kejen, Hiu Martil, Pari Kekeh, Pari Kikir, Pari Manta, Hiu Paus, Capungan Banggai, Napoleon, Kuda Laut, Lumba-Lumba Moncong Panjang, Duyung, Penyu Hijau, Karang Staghorn, Karang Kembang Kol, Teripang Susu Putih dan Teripang Nanas.



Upaya perlindungan terhadap spesies biota perairan yang terancam punah dilakukan melalui satu atau lebih kegiatan berikut: penyediaan data dan informasi biota perairan; penyadartahuan/edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring; peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan baik secara daring atau luring.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara Menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 12. Capaian IK 4 BPRL Denpasar

SK 4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPK Denpasar					
IK 4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	18	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 untuk indikator kinerja ini karena frekuwensi penghitungan indikator kinerja ini adalah Tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai targat Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Denpasar.



D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Biota Perairan Jenis Asing Invasif
2. Penanganan Konflik Biota Perairan
3. Bimtek Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Biota

IK 5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjaga kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya.

Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya yaitu : Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran/restocking dan/atau rehabilitasi habitat dengan jenis Karang. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar meliputi : Penyu, Paus, Lumba-lumba, Hiu Paus dan Duyung. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik yaitu Buaya. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan jenis asing invasif yaitu Aligator Gar.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah melalui satu atau lebih kegiatan berikut:

- a. penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
- b. peningkatan kapasitas SDM Pengelola Biota Perairan tentang *restocking*/rehabilitasi, penanganan terdampar dan/atau penanganan konflik;
- c. penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, *restocking*, penanganan terdampar, penanganan konflik, dan/atau migrasi biota perairan;
- d. dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, *restocking*, penanganan terdampar, penanganan konflik, dan/atau migrasi biota perairan;



- e. penyadartahuan/edukasi terkait upaya pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menjumlahkan Menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya pelestarian di wilayah kerja BPK Denpasar.

Tabel 13. Capaian IK 5 BPK Denpasar

SK 4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPK Denpasar					
IK 5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pestaarian di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	8	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 untuk indikator kinerja ini karena frekuwensi penghitungan indikator kinerja ini adalah Tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pestaarian di Wilayah Kerja BPK Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pestaarian di Wilayah Kerja BPK Denpasar meliputi :

4. Penanganan Biota Perairan Jenis Asing Invasif
5. Penanganan Konflik Biota Perairan



6. Bimtek Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Biota

IK 6. Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (spesies)

Jenis biota perairan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya.

Jenis Kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya terdiri dari: Jenis Ikan yang Dilindungi Penuh; Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas; Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks CITES; Jenis Ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk Apendiks CITES.

Target Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja Balai PK Denpasar adalah 115 (Seratus Lima Belas) spesies meliputi *Acaudina spp.*; *Actinopyga bannwarthi*; *Actinopyga echinites*; *Actinopyga lecanora*; *Actinopyga miliaris*; *Alcyonium spp.*; *Anguilla bicolor*; *Artificial live rock*; *Atelomycterus marmoratus*; *Bohadschia argus*; *Bohadschia marmorata*; *Bohadschia ocellate*; *Bohadschia vitiensis*; *Briareum stechei*; *Capnella sp.*; *Carcharhinus albimarginatus*; *Carcharhinus amblyrhynchos*; *Carcharhinus brevipinna*; *Carcharhinus falciformis*; *Carcharhinus leucas*; *Carcharhinus limbatus*; *Carcharhinus melanopterus*; *Carcharhinus obscurus*; *Carcharhinus plumbeus*; *Carcharhinus sealei*; *Carcharhinus sorrah*; *Carcharhinus tjutjot*; *Cerianthus mortenseni*; *Cerianthus orientalis*; *Cheilinus undulates*; *Chiloscyllium punctatum*; *Cladiella sp.*; *Clavularia star*; *Clavularia viridis*; *Collosporgia auris*; *Cornularia sp.*; *Dendronephthya spp.*; *Discosoma spp.*; *Entacmaea quadricolor*; *Galeocerdo cuvier*; *Glaucostegus thouin*; *Glaucostegus typus*; *Gorgonia sp.*; *Haliclona fulva*; *Heteractis crispa*; *Heteractis magnifica*; *Heteractis malu*; *Himantura uarnak*; *Holacanthus clarionensis*; *Holothuria atra*; *Holothuria coluber*; *Holothuria edulis*; *Holothuria fuscocinerea*; *Holothuria fuscopunctata*; *Holothuria hilla*; *Holothuria lesson*; *Holothuria leucospilota*; *Holothuria notabilis*; *Holothuria rigida*; *Holothuria scabra*; *Klyxum sp.*; *Lobophytum pauciflorum*; *Macroactyla doreensis*; *Maculabatis gerrardi*; *Maculabatis macrura*; *Menella sp.*; *Mustelus widodoi*; *Nebrius ferrugineus*; *Nepthea sp.*; *Osteoglossum bicirrhosum*; *Pachyclavularia*



violacea, *Palythoa* spp.; *Paracaudina coriacea*; *Paragaleus tengi*; *Paralemnalia* sp.; *Parazoanthus gracilis*; *Parazoanthus* spp.; *Pearsonothuria graeffei*; *Phyllophorella spiculata*; *Polycarpa aurata*; *Prionace glauca*; *Pterapogon kauderni*; *Rhina ancylostoma*; *Rhizoprionodon acutus*; *Rhodactis inchoata*; *Rhynchobatus australiae*; *Rhynchobatus laevis*; *Rhynchobatus springeri*; *Ricordea Yuma*; *Sarcophyton ehrenbergi*; *Sarcophyton elegans*; *Sarcophyton* sp.; *Sarcophyton trocheliophorum*; *Scleronephthya* spp.; *Scleropages formosus* (Super red); *Sinularia asterolobata*; *Sinularia dura*; *Sinularia flexibilis*; *Sinularia mollis*; *Sphyrna lewini*; *Sphyrna mokarran*; *Stegostoma tigrinum*; *Stichodactyla gigantea*; *Stichodactyla haddoni*; *Stichodactyla* spp.; *Stichopus chloronotus*; *Stichopus herrmanni*; *Stichopus horrens*; *Stichopus monotuberculatus*; *Stichopus ocellatus*; *Taeniura lymma*; *Thelenota ananas*; *Triaenodon obesus*; *Xenia umbellate*; *Zoanthus sociatus*.

Upaya pemanfaatannya melalui satu atau lebih kegiatan berikut:

- a. Penyiapan data dukung untuk penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
- b. Pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
- c. Penyiapan data dukung dalam penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dari alam;
- d. Pendampingan pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakkan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan.
- e. Fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Apendiks CITES, dan/atau *look alike species* melalui:
 - 1) Untuk jenis dilindungi dan/atau Apendiks CITES berupa:
 - a) verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) oleh BPK Denpasar;
 - b) penerbitan dokumen angkut dalam negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN), verifikasi lapangan, dan penerbitan oleh BPK Denpasar;



- c) verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN) oleh BPK Denpasar.
- 2) Untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Apendiks CITES berupa penerbitan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa jenis yang akan diangkut bukan merupakan jenis dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Proses penerbitan surat rekomendasi dalam negeri dan luar negeri dilakukan oleh BPK Denpasar

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara Menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPK Denpasar.

Tabel 14. Capaian IK 5 BPK Denpasar

SK 5	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Apendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar					
IK 6	Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (spesies)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	28	148	528 / 120 kinerjaku	-	115	128 / 120 Kinerjaku

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Capaian indikator kinerja 6 ini pada Triwulan I 2026 adalah 148 jenis atau 528 persen dari target sebanyak 28 jenis atau sebesar 120 persen apabila mengacu pada aplikasi Kinerjaku, capaian tersebut bahkan sudah melebihi target tahun 2026 yang hanya 115 jenis. Adapun jenis-



jenis ikan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pada Triwulan I 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 15. Jumlah dan Jenis Biota yang dimanfaatkan berkelanjutan di Wilayah kerja BPK Denpasar Triwulan I 2026

No	Komditas	Spesies
1	Anemon	14
2	Hiu	32
3	Live Rock	1
4	Pari	14
5	Soft Coral	44
6	Teripang	38
7	Sidat	2
8	Banggai Cardinal Fish	1
	Jumlah	148

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator yang sama pada Triwulan I 2025 karena pada tahun 2025 untuk indikator ini frekuensi penghitungannya adalah Tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar pada Triwulan I 2026 tidak lepas dari adanya arahan pimpinan yang jelas terkait pelaksanaan pelayanan penerbitan surat rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan sesuai Standar Operasional yang berlaku dan pembagian jadwal pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh semua pegawai yang bertugas, sehingga pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar pada Triwulan I dapat berjalan dengan baik.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar meliputi :

- Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) dan Surat Rekomendasi Look a Like Species. Pada triwulan I Tahun 2026, BPK Denpasar telah menerbitkan 157 dokumen SAJI DN, 222 dokumen Rekomendasi DN, dan 522 dokumen Rekomendasi LN



- Pemeriksaan Stok Gudang yang pada Triwulan I 2026 dilaksanakan sebanyak 79 kali.
- Penerbitan Dokumen Pra Saji, dimana pada Triwulan I 2026 dokumen pra SAJI yang terbit ada 6 dokumen.
- Pembahasan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Maklumat Pelayanan dilaksanakan tanggal 27 Januari 2026.
- Koordinasi Tindak Lanjut Hasil COP20 CITES dan Pengalihan Management Authority (MA) Spesies Akuatik, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Maret 2026 di Bogor.

IK 7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai minimum yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.

Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; dan (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh melalui rumus adalah sebagai berikut di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.

Tabel 16. Capaian IK 5 BPK Denpasar

SK 6	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPK Denpasar					
IK 7	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	80	-

**A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025**

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 untuk indikator kinerja ini karena frekuwensi penghitungan indikator kinerja ini adalah Tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**a. Analisis Keberhasilan**

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai).

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indikator Kinerja Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Denpasar adalah sebagai berikut:

- Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) dan Surat Rekomendasi Look a Like Species.
- Pemeriksaaan Stok Gudang.
- Penerbitan Dokumen Pra Saji.
- Pembahasan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP).

IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Denpasar. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil



pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPK Denpasar.

Formula Perhitungan:

$$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{rekomendasi}$ = Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPK Denpasar

A = Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPK Denpasar

B = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPK Denpasar

Catatan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, maka perhitungan capaian sebesar 100.
2. Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian sebesar 100

Tabel 17. Capaian IK 8 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I2025 (%)	Target PK2026	% Realisasi Thd PK
95	81	100	123 / 120 kinerjajaku	105	81	123

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100 % atau 123% apabila dibandingkan dengan target pada Triwulan I Tahun 2026, hal tersebut sesuai dengan



Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026, tanggal 7 April 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I 2026 apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I 2025 mengalami kenaikan sebesar 123% dimana capaian Triwulan I 2025 adalah 95%..

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar pada Triwulan I 2026 yang capaiannya melebihi target yang sudah ditetapkan berarti di Triwulan I 2026 BPK Denpasar telah menyelesaikan semua rekomendasi dari hasil audit Inspektorat hal tersebut tidak lepas dari kerjasama semua pegawai BPK Denpasar yang terlibat dan juga tentunya berkat arahan pimpinan BPK Denpasar yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama menyelesaikan semua rekomendasi.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%) adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA2025 dan 2026 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (BPK Denpasar) tanggal 19-25 Januari 2026 oleh Inspektorat Jenderal KKP
2. Menyiapkan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi
3. Melakukan upload dokumen tindak lanjut pada Aplikasi SIDAK KKP
4. Seluruh Temuan APIP atas audit Pertanggungjawaban LAUTRA telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Tindak Lanjut

IK 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Denpasar(%)



Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Tahun 2025.

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar diperoleh dengan membandingkan jumlah temuan BPK yang ditandatangani dengan status selesai/TUNTAS dengan jumlah keseluruhan temuan BPK.

$$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{\text{penyelesaian}}$ = Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan . Denpasar
 A = Jumlah nilai tindaklanjut temuan BPK
 B = Jumlah nilai temuan BPK

Catatan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 18. Capaian IK 9 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Denpasar (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	100	-



A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026. Target dan capaian pada akhir Tahun 2026. Pada IK ini juga tidak ada temuan BPK.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Tidak ada kegiatan pendukung karena tidak ada temuan BPK.

IK 10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Denpasar (Nilai)

Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju Zona Integritas (ZI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil oleh instansi pemerintah dalam rangka membangun dan mewujudkan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Rencana kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam organisasi pemerintahan. Peraturan tersebut mengatur bahwa dalam rencana kerja pembangunan ZI, instansi pemerintah harus menyusun berbagai program dan kegiatan untuk:

1. Meningkatkan integritas dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara bersih dan melayani masyarakat dengan baik.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, serta proses pelayanan publik lainnya.



3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Nilai unit kerja berpredikat WBK juga harus memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain:

- Keterlibatan pimpinan instansi dalam mendorong tercapainya ZI.
- Penyusunan indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian dari setiap kegiatan yang dilakukan.
- Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kegiatan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan tercapai.

Adapun standar penilaian antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60 % untuk semua area pengungkit.
3. Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 2,50.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00..

Formula Perhitungan:

Nilai Pelaksanaan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas BPK Denpasar.

$$\text{Nilai WBK} = \text{Jumlah Nilai Setiap Area Pengungkit (60\%)} \\ + \text{Jumlah Nilai Area Hasil (40\%)}$$

Catatan :



Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Tabel 19. Capaian IK 10 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 10	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Denpasar (Nilai)					
Tahun2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	75	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026. Target dan capaian pada akhir Tahun 2026. Pada IK ini hanya terdapat progress kegiatan Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun2025

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

c. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan TIM WBK dan pembagian Pokja kegiatan
2. Evaluasi pengisian data dukung WBK
3. Rapat Evaluasi dan Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada bulan Maret2026

IK 11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPK Denpasar (Nilai)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,



pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Denpasar merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPK Denpasar.

Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

PM SAKIP = Perencanaan (30%) + Pengukuran (30%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi (25%)

Keterangan:

Perencanaan = Perencanaan Kinerja (30%)
Pengukuran = Pengukuran Kinerja (30%)
Pelaporan = Pelaporan Kinerja (15%)
Evaluasi = Evaluasi Kinerja (25%)

Adapun predikat nilai SAKIP sebagai berikut:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Tabel 20. Capaian IK 11 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 11	Nilai PM SAKIP BPK Denpasar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	72	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026. Target dan capaian pada akhir Tahun 2026. Pada IK ini hanya terdapat



progres pada kegiatan layanan perencanaan program dan anggaran serta layanan monitoring evaluasi dan pelaporan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian indikator Nilai PM SAKIP BPK Denpasar belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target nilai PM SAKIP BPK Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%) adalah sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan Program dan Anggaran
 - a. Revisi POK 1 yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - b. Revisi Pemutakhiran KPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - c. Revisi DIPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyusun Manual IKU Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.
- Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Rapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tiap bulan.
 - b. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi dengan eselon I yang dilaksanakan tiap Triwulan
 - c. Verifikasi Pelaporan Online oleh Eselon I.
 - d. Pembahasan dan penetapan dokumen perencanaan kinerja level 1 dan 2.
 - e. Pembahasan dan penetapan dokumen perjanjian kinerja satker lingkup DJPK Tahun 2026.



- f. Penyusunan laporan kinerja DJPK dan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.
- g. Melaksanakan dialog kinerja lingkup BPK Denpasar.

IK 12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} \leq 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} \leq 89$;
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Tabel 21. Capaian IK 7 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	89.5	-



E. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 untuk indikator kinerja ini karena frekwensi penghitungan indikator kinerja ini adalah Tahunan.

F. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

G. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

h. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPK Denpasar.

H. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Rekonsiliasi LPJ Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi Penerimaan Negara Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN Denpasar

IK 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek



Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

Formula Perhitungan:

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi



1. Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

2. Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks_{SBK_i} - Indeks_{RA_{SBK_i}}}{Indeks_{SBK_i}} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK}	: Efisiensi SBK tingkat Satker
Indeks SBK_i	: Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
Indeks RA_{SBK_i}	: Indeks Realisasi RO i SBK



n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$\text{NKPA Satker} = (\text{CRO} \times \text{WCRO}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times \text{WPenggunaan}_{\text{SBK}}) + (\text{NEAlokasi} \times \text{WEAlokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK

WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Tabel 22. Capaian IK 13 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	72.5	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026. Target dan capaian pada akhir Tahun 2026. Pada IK ini hanya terdapat progres pada kegiatan layanan BMN, layanan rumah tangga, dan layanan operational perkantoran.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target nilai kinerja perencanaan anggaran BPK Denpasar.



D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Layanan BMN
 - a. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan sumber dana PHLN pada kegiatan LAUTRA tahun 2025 pada tanggal 10 Januari 2026
 - b. Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMN Tingkat Eselon I untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 13-17 Januari 2026 di Bandung
 - c. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara periode Semester II dan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 16 Januari 2026
 - d. Melakukan Inventarisasi Kondisi Eksisting BMN
 - e. Menyiapkan Dokumen Usulan Penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat
 - f. Melakukan proses usulan Penghapusan BMN pada aplikasi Siman Versi 2 pada modul pengelolaan secara berjenjang melalui tingkat Eselon, Telah dilakukan pemutakhiran data validasi BMN berupa tanah pemerintah serta telah dilakukan proses usulan pendaftaran asuransi BMN berupa sarana dan prasarana gedung bangunan kantor
- Layanan rumah tangga; Penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan untuk menunjang TUSI BPK Denpasar
- Layanan perkantoran
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan sesuai ketentuan
 - b. Operasional dan pemeliharaan kantor secara rutin

IK 14. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPK Denpasar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan



yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025:

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 23. Capaian IK 9 BPK Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 9	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPK Denpasar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
1	1	1	100	0	4	25

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tercapai 1 laporan SPIP Tahun 2025 yang merupakan capaian dari target IK ini pada Triwulan I Tahun 2026

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 sama dengan capaian Triwulan I tahun 2025. Capaian tersebut adalah Laporan SPIP Tahun 2024 disusun pada Triwulan I Tahun 2025 dan Laporan SPIP Tahun 2025 yang disusun pada Triwulan I Tahun 2026.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Capaian Triwulan I Tahun 2026 untuk Indikator Kinerja laporan SPIP yang disusun lingkup BPK Denpasar adalah berkat koordinasi yang baik dari semua komponen yang terlibat dan komitmen dari anggota tim SPIP yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan laporan sesuai waktu yang sudah ditetapkan dan juga tentunya berkat arahan dan bimbingan dari pimpinan.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPK Denpasar (Dokumen) adalah telah dilakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP TW IV Tahun 2025.



IK 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPK Denpasar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Formula Perhitungan:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua);
- SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut.

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20



3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DI /	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DI /	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DI /	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DI /	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan



- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	< 20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	< 24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- ✓ Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- ✓ Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.



Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP_{BPK \text{ Denpasar}} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup BPK Denpasar}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:



- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai

Tabel 24. Capaian IK 15 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPK Denpasar (Indeks)					
Tahun2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I2025 (%)	Target PK2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	81	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026. Target dan capaian pada akhir Tahun 2026. Pada IK ini hanya terdapat progres pada kegiatan layanan manajemen SDM.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun2025

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

c. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indeks profesionalitas (IP ASN) lingkup BPK Denpasar.



D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPK Denpasar (Indeks) adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Periode Bulan Februari dan Maret TA.2026
2. Evaluasi Kinerja ASN BPK Denpasar Triw. 4 dan Periode Final TA.2025
3. Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK a.n Dikor Jupantara
4. Pengusulan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional a.n Yuniarti KP
5. Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode April 2026
6. Menyiapkan Rekapitulasi kehadiran ASN BPK Denpasar Bulan Januari-Maret 2025
7. Pengusulan Satyalancana Karya Satya X Tahun dan XX Tahun
8. Menyiapkan dan melaksanakan Dialog Kinerja BPK Denpasar
9. Pengusulan Perpindahan antar Jabatan a.n Anang Tri Jayanto dan Nurhamdani
10. Pengusulan Rencana Tugas Belajar Tahun 2026
11. Menyiapkan Rekapitulasi Pengisian SPT Tahunan dan LHKPN lingkup BPK Denpasar
12. Pengusulan Penataan Jabatan Fungsional Umum Lingkup BPK Denpasar

IK 16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Denpasar (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- 1) Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;



- 2) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Nilai pengawasan kearsipan internal BPK Denpasar merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

- a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Sumber Daya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100
A	Memuaskan	> 80 – 90
BB	Sangat Baik	> 70 – 80
B	Baik	> 60 – 70
CC	Cukup	> 50 – 60
C	Kurang	> 30 – 50
D	Sangat Kurang	0 - 30



Tabel 25. Capaian IK 16 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 16	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Denpasar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	81	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026. Target dan capaian pada akhir Tahun 2026. Pada IK ini hanya terdapat progress layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

d. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

IK 17. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Denpasar (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP.

Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.



Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan Pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 26. Capaian IK 17 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 17	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Denpasar (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK 2026	% Realisasi Thd PK
-	74	100	120 (kinerjaku)	-	76	120

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Capaian presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Denpasar tercapai 100% dari target 76%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 karena Indikator Kinerja ini ada pada tahun 2025 dan tidak ada pada tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan



Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan target setiap triwulan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Denpasar adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan revisi Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan Revisi POK 1 yang telah disahkan
- Telah dilaksanakan penyiapan bahan untuk revisi rencana umum pengadaan sesuai revisi DIPA 2 dalam rangka efisiensi anggaran
- Revisi Rencana Umum Pengadaan pasca efisiensi anggaran
- Pengisian kertas kerja data RUP pasca efisiensi anggaran

IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPK Denpasar (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: Mengumumkan informasi publik; Menyediakan informasi publik; Sarana dan Prasarana; Kelembagaan; dan Digitalisasi.

Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator



(mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).

SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.

Formula Perhitungan:

1. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari penilaian SAQ yang diakses melalui ppid.kkp.go.id / pelikan.
2. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No.	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9
5	Tidak Informatif	< 39,9

Formula Perhitungan:

1. Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
2. SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
3. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
4. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %.



5. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No.	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9
5	Tidak Informatif	< 39,9

Tabel 27. Capaian IK 18 BPK Denpasar

SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPK Denpasar					
IK 18	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Denpasar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025 (%)	Target PK2026	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	92	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026. Target dan capaian pada akhir Tahun 2026. Pada IK ini hanya terdapat progress layanan kehumasan yaitu publikasi secara rutin.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

e. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPK Denpasar.



D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPK Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan publikasi kegiatan secara rutin

3.3 Realisasi Anggaran

Pagu awal BPK Denpasar tahun 2026 adalah sebesar 15.364.110.000 yang terdiri dari RM 13.364.119.000 dan PLN 2.000.000.000. Dari pagu awal terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) sebesar 2.564.650.000. Blokir ini berupa blokir kode 2 (alokasi harus dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sebesar RP.387.910.000 yang terdiri dari belanja belanja modal (53) 200.000.000 dan pemeliharaan gedung 187.910.000. Blokir lain adalah blokir kode 3 (Belum Memenuhi Persyaratan Teknis/Substantif) sebesar RP. 2.176.740.000 yang seluruhnya terdiri dari belanja barang. Setelah dilakukan revisi anggaran, terdapat perubahan komposisi anggaran yang bisa digukanan dan yang blokir. Terdapat pemotongan anggaran sebesar 1.624.696.000 dan perubahan komposisi blokir dari blokir kode 3 menjadi kode A. Terdapat pembukaan blokir sebesar 906.981.000. Selain itu juga dilakukan pembukaan seluruh anggaran yang diblokir dari kode 2 dan pembukaan anggaran dari kode blokir 3 sebesar 1.212.103.000. Total realisasi sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.853.195.385 atau 22,25%.



BAB IV PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja IKU BPK Denpasar hingga Triwulan I Tahun 2026 dinilai Istimewa jika dilihat dari penilaian di aplikasi kinerjaku yaitu sebesar 117,5% dengan uraian sebagai berikut :

1. IK 6 Biota perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPK Denpasar (spesies) (148 spesies)
2. IK 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%) (100%)
3. IK 14 Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPK Denpasar (Dokumen) (1 Dokumen)
4. IK17 Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Denpasar (%) (100)

Capaian kinerja BPK Denpasar seluruhnya mendukung capaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPK Denpasar; dan
2. Melakukan penyesuaian dokumen Standar Pelayanan dan SOP-SOP terkait sesuai dengan Nomenklatur baru Organisasi.



1.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Telah diupayakan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada periode Triwulan IV Tahun 2025 terhadap perbaikan kinerja ke depan antara lain sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Tindak Lanjut
Melakukan pertemuan untuk evaluasi kegiatan Tahun 2025	Telah Dilakukan pertemuan untuk evaluasi kegiatan Tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1KZuKH4uDreMLbeQQAB_LmLURD688qGs1
Menindaklanjuti catatan hasil pengawasan APIP Tahun 2025	catatan hasil pengawasan APIP Tahun 2025 telah ditindaklanjuti	



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAMPIRAN





1. Perjanjian Kinerja BPK Denpasar

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4150 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3525357 LAMAR: www.kkp.go.id SURTEL: ditjenk@kp.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN (BPK) DENPASAR	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	Getreda Melaina Hahanussa
Jabatan :	Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama :	A. Koewara
Jabatan :	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 17 Maret 2026	
Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Pihak Pertama Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar
	
A. Koewara	Getreda Melaina Hahanussa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN (BPK) DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Nilai)	51
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kampanye untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPK Denpasar	2.	Kemithaan Konservasi yang Diminiasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Kesepakatan)	1
3.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Denpasar	3.	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Laut Sulawesi (Nilai)	60
4.	Terkabainya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilindungi di Wilayah Kerja BPK Denpasar	4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)	18
		5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Jenis)	8
5.	Terkabainya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendix CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar	6.	Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Spesies)	113
6.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPK Denpasar	7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Denpasar (Nilai)	60
7.	Tersujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Denpasar	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Denpasar (%)	61
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Denpasar (%)	100
		10.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Denpasar (Nilai)	75
		11.	Nilai PM SAKIP BPK Denpasar (Nilai)	72
		12.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)	88,5
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Denpasar (Nilai)	72,5
		14.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPK Denpasar (Dokumen)	4



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		15. Indeks Profesionalitas ASN BPK Denpasar (Indeks)	81
		16. Nilai Pengawasan Keaslian Internal BPK Denpasar (Nilai)	81
		17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIPUP Lingkup BPK Denpasar (%)	77
		18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Denpasar (Nilai)	92



Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Pesisir, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil	3.800.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	11.564.110.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Denpasar Tahun 2026		15.364.110.000

Jakarta, 17 Maret 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan KelautanDitandatangani
Secara Elektronik

A. Koewara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Kelautan
DenpasarDitandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melaina Hehanussa



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KKP
2026
GROW STRONGER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

PRESTASI DAN LAIN-LAIN



LAUT
SEHAT
KONSERVASI
KUAT
INDONESIA
SEJAHTERA
BALAI PK
DENPASAR

Salam
PRIMA



2. Penghargaan yang Diterima BPK Denpasar

- Penghargaan Satker Satuan Kerja Sangat Aktif Kategori Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SDG
2030
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

KKP
2026
#GROWSTRONGER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAUT
SEHAT
KONSERVASI
KUAT
INDONESIA
SEJAHTERA

BALAI
PENGELOLAAN
KELAUTAN
DENPASAR

